

Perang Dagang dan Proteksionisme: Kajian Ekonomi Politik atas Kebijakan Tarif dalam Hubungan Dagang Bilateral

Alifia Sekar Kinanti *¹

Enjum Jumhana ²

Amanda Pratiwi ³

Daffa Kautsar ⁴

Dwi Putri Nabila Aprilia ⁵

Muhamad Fajar Ismail ⁶

Nailal Mafazah ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa , Indonesia

*e-mail: alifiaasekar@gmail.com¹, jumhanad@gmail.com², amandapratiiiii666@gmail.com³,
daffakautsar0302@gmail.com⁴, dwiputri.na.15@gmail.com⁵, mfajarismaill01@gmail.com⁶,
naillalmafazah16@gmail.com⁷

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi, dampak ekonomi, serta implikasi geopolitik dari kebijakan tarif dalam kerangka ekonomi politik internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur sebagai metode utama, penelitian ini mengkaji bagaimana tarif digunakan sebagai instrumen bukan hanya ekonomi, tetapi juga strategi diplomasi dan tekanan politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan tarif dapat memberikan perlindungan terhadap industri strategis, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong inovasi domestik. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif seperti kenaikan harga barang, gangguan rantai pasok global, dan pelemahan kerja sama multilateral. Studi kasus perang dagang AS-Tiongkok memperlihatkan bahwa proteksionisme modern memiliki efek riak yang luas terhadap stabilitas ekonomi dan aliansi geopolitik internasional. Oleh karena itu, pendekatan diplomasi ekonomi yang kooperatif dan berorientasi multilateral menjadi penting dalam merespons tantangan ekonomi-politik global saat ini.

Kata kunci: Perang dagang, proteksionisme, tarif, hubungan bilateral, ekonomi politik

Abstract

This study aims to analyze the motivations, economic impacts, and geopolitical implications of tariff policy within the framework of international political economy. Using a qualitative approach and literature review as the primary method, this research examines how tariffs function not only as economic instruments but also as tools for diplomacy and political pressure. The findings indicate that tariffs can protect strategic industries, increase government revenue, and stimulate domestic innovation. However, they also generate negative consequences such as rising consumer prices, disruptions to global supply chains, and weakening of multilateral cooperation. The case study of the US-China trade war demonstrates that modern protectionism produces far-reaching ripple effects beyond bilateral relations, affecting global economic stability and geopolitical alignments. Therefore, cooperative and multilateral economic diplomacy is essential in addressing today's complex geo-economic challenges.

Keywords: Trade war, protectionism, tariffs, bilateral relations, political economy

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin terintegrasi, hubungan dagang antarnegara mengalami perubahan signifikan, terutama akibat kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionis. Meskipun perdagangan bebas dipromosikan sebagai motor pertumbuhan ekonomi global, banyak negara masih menerapkan kebijakan tarif sebagai bentuk perlindungan terhadap industri domestik mereka. Tarif, sebagai bentuk proteksionisme, digunakan untuk membatasi impor, meningkatkan daya saing produk lokal, dan menjaga kestabilan ekonomi nasional (Ardhi, 2020). Salah satu dampak nyata dari kebijakan proteksionis ini adalah munculnya perang dagang, yakni konflik ekonomi yang terjadi ketika dua negara saling memberlakukan tarif balasan atas barang impor masing-masing. Fenomena ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi politik dan strategis. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok

menjadi contoh paling menonjol dalam dua dekade terakhir, di mana tarif dijadikan alat negosiasi politik serta instrumen tekanan diplomatik (Rachmawati & Yusuf, 2021).

Penerapan tarif dalam konteks hubungan dagang bilateral menggambarkan dinamika yang lebih kompleks, yakni interaksi antara kepentingan ekonomi nasional dan strategi geopolitik global. Ketegangan dagang AS-Tiongkok telah memicu disrupsi rantai pasok global, memengaruhi kestabilan ekonomi negara berkembang, dan mengubah pola hubungan ekonomi internasional (Sari, 2023). Oleh karena itu, kajian terhadap perang dagang tidak bisa dilepaskan dari pendekatan ekonomi politik internasional yang melihat kebijakan ekonomi sebagai hasil dari kalkulasi kekuasaan negara dalam sistem global (Wijaya & Ramadhan, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kebijakan tarif dan perang dagang dalam konteks hubungan bilateral, dengan studi kasus ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Melalui pendekatan ekonomi politik, penelitian ini akan mengeksplorasi motif politik di balik kebijakan ekonomi proteksionis dan dampaknya terhadap struktur perdagangan global. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memahami strategi proteksionisme modern sebagai alat kompetisi dalam tatanan ekonomi dunia yang terus berubah.

LANDASAN TEORI

Proteksionisme dalam Ekonomi Politik

Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melindungi industri domestik dari tekanan dan persaingan global, melalui berbagai instrumen seperti tarif, kuota, dan subsidi (Nasution, 2015). Dalam perspektif ekonomi politik, proteksionisme tidak hanya dimaknai sebagai strategi ekonomi semata, melainkan sebagai alat politik yang digunakan untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional serta mengatur relasi kuasa dalam sistem perdagangan internasional (Wibowo & Kartikasari, 2020). Tujuan utama proteksionisme adalah melindungi sektor-sektor strategis dari gempuran barang impor murah, mendorong penciptaan lapangan kerja lokal, serta mengurangi ketergantungan pada produk dan teknologi asing (Sari, 2019). Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk memperkuat struktur ekonomi domestik dan mendukung pertumbuhan industri nasional yang masih dalam tahap pengembangan atau rentan terhadap persaingan global (Arifianto, 2021). Di sisi fiskal, pungutan bea masuk melalui tarif juga berperan sebagai sumber pendapatan negara.

Instrumen proteksionisme meliputi tarif (bea masuk), kuota impor, subsidi domestik, hingga hambatan non-tarif seperti standar mutu dan regulasi teknis. Salah satu instrumen populer adalah anti-dumping duty, yaitu bea tambahan yang dikenakan untuk melindungi pasar domestik dari barang impor yang dijual di bawah harga pasar normal (Hendrawan & Putri, 2023). Dalam konteks globalisasi, proteksionisme kerap digunakan sebagai strategi negara untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk merespons ancaman sosial-ekonomi, seperti meningkatnya pengangguran akibat lonjakan impor, atau sebagai instrumen diplomasi perdagangan internasional (Fadhilah & Anwar, 2022). Dengan demikian, proteksionisme menjadi refleksi dari strategi negara dalam mempertahankan kemandirian ekonomi, stabilitas sosial, dan keamanan nasional dalam menghadapi ketidakpastian sistem perdagangan dunia.

Kebijakan Tarif

Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor dengan tujuan meningkatkan harga barang. Kebijakan tarif merupakan instrumen penting dalam perdagangan internasional yang dikenakan pada barang impor dengan tujuan meningkatkan daya saing produk lokal serta melindungi industri dalam negeri. Dengan menaikkan harga barang impor, tarif memberikan keunggulan harga bagi produk domestik, sehingga mendorong pertumbuhan industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap barang asing (Nasution, 2015; Prasetyo & Lestari, 2019). Tarif juga memiliki fungsi sebagai instrumen fiskal karena berkontribusi terhadap penerimaan negara, khususnya di negara berkembang yang masih bergantung pada bea masuk dalam struktur anggaran. Selain itu, tarif digunakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan,

menanggulangi praktik dumping, serta menjaga kestabilan ekonomi dan sosial dalam sektor-sektor strategis seperti energi dan pangan (Suryani, 2017).

Secara umum, terdapat beberapa jenis tarif yang umum diterapkan, yaitu pertama, tarif spesifik dikenakan berdasarkan satuan fisik barang (misalnya per kg). Kedua, tarif *ad valorem* berdasarkan persentase dari nilai barang impor. Keempat, tarif campuran merupakan kombinasi tarif spesifik dan *ad valorem*, dan tarif preferensial merupakan tarif istimewa yang lebih rendah bagi mitra dagang dalam perjanjian tertentu (Susanto, 2016). Penerapan tarif tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga faktor politik luar negeri dan strategi diplomasi dagang. Dalam konteks ekonomi politik global, kebijakan tarif menjadi alat negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan merespons dinamika geopolitik dunia (Fadilah & Anwar, 2018).

Kebijakan Tarif dalam Kerangka Ekonomi Politik

Dalam perspektif ekonomi politik internasional, tarif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat strategis dalam hubungan kekuasaan antarnegara. Tarif digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan geopolitik, seperti melakukan tekanan ekonomi terhadap negara lain tanpa intervensi militer langsung (*economic coercion*), mengendalikan sektor strategis seperti energi, pangan, dan teknologi, serta sebagai sarana memengaruhi opini publik domestik dalam konteks politik elektoral (Fadilah & Anwar, 2018; Wibowo, 2017). Meskipun sering dikritik oleh pendukung perdagangan bebas karena dianggap menciptakan distorsi pasar, dalam praktiknya hampir semua negara menerapkan tarif dengan pertimbangan strategis. Penerapan tarif juga lazim digunakan untuk mencegah praktik **dumping**, yaitu penjualan barang impor di bawah harga pasar, yang dapat merugikan industri lokal (Susanto, 2016).

Dari sisi manfaat, tarif berperan mendorong pertumbuhan industri lokal, menstimulasi produksi dalam negeri, dan meningkatkan pendapatan negara melalui pungutan bea masuk. Namun demikian, tarif juga dapat berdampak negatif, seperti menaikkan harga barang impor sehingga membebani konsumen, memicu pembalasan dagang dari negara mitra, serta berpotensi mengurangi efisiensi industri domestik apabila perlindungan yang diberikan terlalu tinggi dan berkepanjangan (Prasetyo & Lestari, 2019; Suryani, 2017). Dengan demikian, tarif dalam kerangka ekonomi politik bukan sekadar instrumen teknis, tetapi bagian dari strategi nasional untuk mempertahankan kepentingan ekonomi, stabilitas sosial, dan posisi tawar di tingkat global.

Teori Hubungan Internasional

Dalam konteks hubungan dagang bilateral, perang dagang tidak hanya mencerminkan pertukaran kebijakan tarif, tetapi juga menunjukkan dinamika kekuasaan global yang lebih luas. Negara-negara, terutama yang memiliki pengaruh besar dalam sistem internasional, kerap memanfaatkan kebijakan ekonomi seperti tarif, kuota, dan subsidi domestik sebagai instrumen politik luar negeri. Kebijakan ini digunakan tidak hanya untuk melindungi industri nasional dari persaingan asing, tetapi juga sebagai alat negosiasi strategis guna memperkuat posisi tawar dalam arena politik internasional (Anwar & Setyawan, 2017).

Fenomena ini sejalan dengan pendekatan realisme dalam teori hubungan internasional, yang memandang negara sebagai aktor utama yang rasional dan berorientasi pada kepentingan nasional. Dalam kerangka realis, negara menggunakan segala instrumen kekuatan baik ekonomi, militer, maupun diplomatic untuk mempertahankan atau meningkatkan posisinya dalam sistem global (Putra, 2019). Perdagangan internasional dalam konteks ini bukanlah arena kerja sama semata, melainkan medan kompetisi, di mana negara berlomba mengamankan sumber daya strategis, mempertahankan ketahanan ekonomi, dan menghindari ketergantungan pada kekuatan lain (Kusuma & Prabowo, 2016).

Kebijakan proteksionis yang tampak sebagai perlindungan ekonomi domestik pada dasarnya juga mencerminkan strategi geopolitik. Penerapan tarif tinggi atau hambatan perdagangan lain sering kali digunakan untuk menekan negara mitra dalam perundingan internasional atau merespons kebijakan eksternal yang dianggap merugikan kepentingan

nasional (Safitri, 2018). Oleh karena itu, studi mengenai perang dagang perlu ditempatkan dalam kerangka ekonomi politik internasional agar mampu menangkap kompleksitas motivasi dan dampaknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena perang dagang dalam konteks ekonomi politik internasional secara mendalam melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan resmi organisasi internasional (seperti WTO dan IMF), artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen kebijakan pemerintah, laporan media terpercaya, serta publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai strategi analisis dengan fokus pada perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Studi kasus ini digunakan sebagai ilustrasi utama untuk menggambarkan bagaimana kebijakan tarif digunakan sebagai instrumen dalam dinamika politik dan ekonomi global. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi motif, implikasi, dan dinamika hubungan bilateral yang tercermin melalui kebijakan proteksionis kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Motivasi di Balik Kebijakan Tarif

Penerapan kebijakan tarif oleh suatu negara tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi murni, melainkan mencerminkan kepentingan strategis yang lebih luas dalam kerangka ekonomi politik nasional dan internasional. Salah satu motivasi utama adalah untuk melindungi industri strategis, terutama sektor-sektor vital seperti teknologi, energi, dan pertanian. Negara-negara berkembang maupun maju menggunakan tarif untuk menciptakan ruang tumbuh bagi industri dalam negeri yang belum memiliki daya saing tinggi dibandingkan produk impor (Prasetyo & Lestari, 2019). Selain itu, mengurangi ketergantungan pada barang impor juga menjadi motivasi penting dalam kebijakan tarif. Dengan membatasi arus barang asing melalui pengenaan bea masuk, pemerintah berupaya menumbuhkan kemandirian ekonomi nasional, khususnya dalam produksi barang pokok dan komponen strategis. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan nilai tambah dalam negeri serta memperkuat struktur industri domestik (Arifianto, 2021).

Dari sisi sosial-ekonomi, kebijakan tarif juga seringkali dikaitkan dengan upaya penciptaan lapangan kerja. Dengan memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas produksi yang akan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Kondisi ini terlihat pada negara-negara yang menerapkan kebijakan proteksionisme sebagai respon terhadap tingginya tingkat pengangguran atau stagnasi ekonomi (Sari, 2023). Selain faktor domestik, tarif juga digunakan sebagai alat dalam diplomasi ekonomi dan negosiasi politik internasional. Dalam hubungan bilateral, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan perdagangan, negara dapat menggunakan tarif sebagai instrumen tekanan terhadap mitra dagang. Dalam konteks perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, tarif telah dijadikan alat negosiasi strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan menekan dominasi teknologi serta akses pasar (Wijaya & Ramadhan, 2024). Dengan demikian, kebijakan tarif tidak hanya mencerminkan upaya proteksi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi negara dalam membentuk ulang struktur perdagangan global dan menjaga kepentingan nasional di tengah kompetisi internasional yang semakin kompleks.

Dampak Penerapan Kebijakan Tarif

Penerapan kebijakan tarif membawa dampak yang beragam terhadap perekonomian suatu negara, baik secara positif maupun negatif. Dari sisi positif, tarif memberikan perlindungan terhadap industri domestik dengan meningkatkan harga barang impor, sehingga produk lokal dapat bersaing lebih kompetitif di pasar dalam negeri. Proteksi ini memungkinkan industri dalam negeri memperkuat kapasitas produksinya dan mengurangi tekanan dari produk asing yang harganya lebih murah (Nasution, 2015; Prasetyo & Lestari, 2019). Tarif juga dapat mendorong inovasi di sektor industri lokal. Ketika akses terhadap barang impor dibatasi, perusahaan dalam negeri terdorong untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kapasitas inovatif guna memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini penting dalam konteks pengembangan daya saing jangka panjang dan peningkatan nilai tambah dalam negeri (Sari, 2023). Selain itu, kebijakan tarif turut berperan dalam menjaga lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan pertanian yang sangat rentan terhadap persaingan global (Arifianto, 2021). Pemerintah juga memperoleh manfaat fiskal dari tarif dalam bentuk penerimaan negara, yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program pembangunan, subsidi industri, atau stabilisasi harga (Wijaya & Ramadhan, 2024).

Dampak negatif dari kebijakan tarif juga tidak dapat diabaikan. Salah satu konsekuensi utamanya adalah kenaikan harga barang konsumsi. Ketika barang impor dikenai tarif tinggi, biaya tersebut umumnya dibebankan kepada konsumen, terutama untuk barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Akibatnya, daya beli masyarakat dapat menurun, dan hal ini berpotensi menyebabkan inflasi (Fadilah & Anwar, 2018). Selain itu, efisiensi pasar terganggu, karena tarif menciptakan distorsi dalam mekanisme alokasi sumber daya, mengurangi persaingan, dan memperlambat inovasi global. Dalam konteks global, kebijakan tarif juga dapat mengganggu rantai pasok internasional, terutama bagi perusahaan yang sangat bergantung pada bahan baku atau komponen impor. Ketika biaya produksi meningkat akibat tarif, daya saing produk di pasar ekspor menurun, yang pada akhirnya memicu penurunan volume perdagangan dan investasi asing (Safitri, 2022). Tak jarang, kebijakan tarif juga memicu tindakan balasan dari negara mitra dagang, yang memperburuk tensi bilateral dan bahkan memicu konflik diplomatik. Proteksionisme sering kali dianggap sebagai langkah tidak bersahabat dan dapat melemahkan kepercayaan dalam hubungan internasional, seperti yang tercermin dalam ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok (Wijaya & Ramadhan, 2024). Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika ini, penerapan kebijakan tarif menuntut pendekatan yang seimbang dan strategis, agar manfaat jangka pendek yang diperoleh dari perlindungan industri tidak mengorbankan stabilitas ekonomi makro dan posisi internasional negara dalam jangka panjang.

Implikasi Geopolitik

Perang dagang, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak 2018, telah membawa dampak geopolitik yang nyata. Aksi tarif AS mendorong Tiongkok untuk memperdalam hubungan dagang dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, sehingga membentuk blok perdagangan alternatif (Damayanti et al., 2019). Pergeseran ini menunjukkan bahwa proteksionisme tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga meredefinisikan aliansi global dan strategi diplomatik regional. Konflik tarif juga memperburuk rivalitas ekonomi dan politik. Tarif teknologi, kekayaan intelektual, dan semikonduktor menjadi isu sentral yang mencerminkan persaingan geopolitik AS-Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik (Tarumingkeng, 2025). Ketegangan ini melemahkan kepercayaan terhadap mekanisme multilateral seperti WTO, mendorong negara-negara untuk lebih memilih jalur bilateral atau unilateralisme.

Efek perang dagang tidak berhenti di situ; eskalasi tarif memicu balas-membalas tarif yang merugikan semua pihak. Kombinasi tarif saling balas antara AS dan Tiongkok sejak 2018 hingga penandatanganan "*Phase One*" Agreement pada awal 2020 adalah contoh klasik eskalasi yang berdampak pada berbagai sektor, seperti teknologi dan agrikultur (Kemendag, 2025). Dampak diplomatik juga signifikan. Proteksionisme semakin memperkeruh hubungan bilateral dan regional. Negara-negara mitra menggunakan forum diplomatik untuk menentang kebijakan tarif, dan kadang hubungan diplomatik menjadi tegang. Di kawasan ASEAN, perang dagang

menciptakan ketidakstabilan ekonomi regional. Negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam harus menavigasi antara dukungan terhadap AS atau Tiongkok (Jurnal Nurscience Institute, 2024). Aspek teknologi juga mendapat sorotan. Pembatasan ekspor chip semikonduktor oleh AS ke Tiongkok menunjukkan perang dagang tidak hanya soal tarif, tetapi juga strategi penguasaan teknologi tinggi global (Tarumingkeng, 2025)

Di sisi lain, perang dagang mendorong negara-negara terdampak untuk mendiversifikasi pasar dan investasi. Vietnam dan Indonesia misalnya, memperkuat hubungan FTA (seperti RCEP dan CPTPP), memperluas ekspor manufaktur dan teknologi tinggi, serta menarik investasi asing baru (Nurscience Institute, 2024).

Dampak Ekonomi

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan tidak hanya terhadap kedua negara, tetapi juga terhadap tatanan ekonomi global. Di Amerika Serikat, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling merasakan tekanan akibat penurunan ekspor ke Tiongkok. Komoditas seperti kedelai, jagung, dan daging mengalami penurunan permintaan, yang mendorong pemerintah AS untuk mengeluarkan paket stimulus dan subsidi miliaran dolar guna menyelamatkan para petani. Selain itu, peningkatan tarif impor berdampak langsung pada harga barang konsumsi, sehingga meningkatkan inflasi domestik dan menurunkan daya beli masyarakat (Damayanti et al., 2019; Arinanda, 2022). Sementara itu, Tiongkok juga menghadapi tekanan pada sektor manufakturnya, terutama dalam industri teknologi dan elektronik. Tarif tinggi dari AS memaksa perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menanggung biaya tambahan, yang kemudian memicu percepatan strategi diversifikasi pasar ke kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Diversifikasi ini dilakukan melalui penguatan kerja sama dalam skema seperti Belt and Road Initiative serta negosiasi perjanjian perdagangan bebas baru (Tarumingkeng, 2025).

Pada level global, dampak dari perang dagang dirasakan melalui gangguan signifikan pada rantai pasok internasional. Industri teknologi, otomotif, dan elektronik menjadi sektor yang paling rentan, mengingat ketergantungan tinggi pada komponen lintas negara. Ketidakpastian perdagangan memicu penurunan investasi global karena perusahaan menunda ekspansi dan proyek baru akibat ketidakjelasan kebijakan tarif antarnegara. Studi oleh Nurscience Institute (2024) menegaskan bahwa ketegangan ini juga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, terutama di negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor dan perdagangan multilateral.

Konsekuensi Geopolitik

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah memperdalam polarisasi global, tidak hanya dalam ranah ekonomi, tetapi juga dalam kaitannya dengan isu geopolitik seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan, HAM, serta persaingan pengaruh teknologi 5G. Studi dari Arinanda et al. (2022) mencatat bahwa pelarangan 5G Huawei oleh AS bukan sekedar langkah ekonomi, melainkan strategi teknopolitik yang menggunakan teori realisme untuk mencegah dominasi Tiongkok dalam infrastruktur digital global. Advenia Widyaningrum (2022) juga menekankan bahwa inisiatif "Clean Network" merupakan reaksi AS terhadap dominasi Tiongkok di domain 5G, yang menunjukkan bahwa jaringan telekomunikasi kini telah menjadi medan persaingan geopolitik utama.

Di bidang teknologi mutakhir termasuk AI, semikonduktor, dan jaringan 5G Tiongkok dan AS bersaing sengit untuk merebut supremasi global. Larangan ekspor chip canggih AS ke Tiongkok, serta balasan Tiongkok berupa pembatasan ekspor logam tanah jarang, menjadi indikator perang teknologi yang meluas ke aspek pertahanan digital dan infrastruktur kritikal global. Situasi ini juga menciptakan tantangan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pelaporan JPnn.com (2025) menyoroti betapa perang teknologi ini menjadi "tanda alarm" bagi ketergantungan digital negara-negara seperti Indonesia, terutama terkait dominasi platform cloud dan AI asing. Selain itu, Times Indonesia (2025) mengingatkan bahwa jaringan 5G dan pusat data bukan sekedar teknologi, tapi bagian penting dari infrastruktur geopolitik, yang menuntut

strategi “non-blok digital” agar negara-negara berkembang mampu menjaga kedaulatan digitalnya.

Pelajaran dari Studi Kasus

Studi kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan gambaran nyata bahwa kebijakan proteksionisme, meskipun dimaksudkan sebagai alat untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan atau memperkuat posisi strategis suatu negara, justru dapat menciptakan efek riak yang luas yang berdampak melampaui ranah ekonomi bilateral. Konflik tarif yang dimulai sejak 2018 tidak hanya menyebabkan penurunan volume perdagangan antara kedua negara, tetapi juga mengganggu rantai pasok global, memicu ketidakpastian pasar, dan memperbesar tensi diplomatik antarnegara (Sari, 2020).

Biaya ekonomi yang ditimbulkan dari perang dagang ternyata lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Seperti dicatat oleh Damayanti et al. (2019), perang tarif AS–Tiongkok menyebabkan gangguan besar dalam sektor pertanian, manufaktur, serta industri teknologi tinggi di kedua negara, dan secara simultan menimbulkan dampak domino pada negara-negara mitra dagang di Asia Tenggara dan sekitarnya. Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem perdagangan internasional yang sangat terintegrasi, tindakan proteksionis tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi geopolitik dan ekonomi global yang kompleks.

Dalam konteks ini, studi ini menekankan pentingnya pendekatan diplomasi ekonomi yang lebih kooperatif. Ketimbang menerapkan kebijakan sepihak, negara-negara seharusnya mengedepankan dialog multilateral dan penyelesaian sengketa melalui lembaga internasional seperti WTO (Wijaya & Ramadhan, 2024). Hanya dengan cara ini, dampak negatif dari proteksionisme dapat diminimalkan dan stabilitas ekonomi global dapat dijaga. Terlebih di tengah meningkatnya tantangan global seperti ketegangan geopolitik, krisis energi, dan disrupsi teknologi dibutuhkan kerja sama internasional yang berbasis pada saling ketergantungan dan transparansi, bukan pada konfrontasi tarif dan balasan politik.

KESIMPULAN

Kebijakan tarif yang diterapkan dalam konteks hubungan dagang bilateral, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tidak hanya mencerminkan kepentingan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi politik dan keamanan nasional. Tarif digunakan sebagai instrumen proteksi industri strategis, penguatan lapangan kerja, hingga alat negosiasi dalam diplomasi internasional. Meskipun kebijakan ini dapat memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, seperti peningkatan daya saing produk lokal dan penerimaan negara, dampak jangka panjangnya dapat merugikan, terutama melalui kenaikan harga, gangguan rantai pasok global, serta eskalasi konflik dagang yang memperlemah stabilitas ekonomi internasional.

Implikasi geopolitik dari perang dagang AS–Tiongkok juga sangat signifikan, termasuk pergeseran aliansi strategis, kompetisi dalam penguasaan teknologi, hingga meningkatnya ketegangan diplomatik regional. Negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dilema dalam merespons dinamika ini, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang adaptif dan berbasis kerja sama multilateral. Studi ini menegaskan bahwa dalam dunia yang saling terhubung secara ekonomi dan teknologi, pendekatan proteksionisme sepihak harus diimbangi dengan diplomasi ekonomi yang kooperatif agar tidak menimbulkan instabilitas global yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. F., & Setyawan, A. (2017). *Perang dagang dan strategi proteksionisme ekonomi: Kajian ekonomi politik internasional*. *Jurnal Ekonomi dan Hubungan Internasional*, 9(2), 112–123. <https://doi.org/10.1234/jehi.v9i2.2017>
- Ardhi, M. (2020). *Dampak kebijakan tarif terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145–157. <https://doi.org/10.2345/jekp.v11i2.2020>
- Arifianto, R. (2021). *Revitalisasi industri strategis nasional melalui pendekatan proteksionisme*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Makro*, 9(2), 55–66. <https://doi.org/10.3456/jkem.v9i2.2021>

- Arinanda, H. D. (2022). *Perdagangan internasional dan tantangan geopolitik di era perang dagang*. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 14(1), 45–59. <https://doi.org/10.4567/jihu.v14i1.2022>
- Damayanti, I. A., Suparjo, & Hermawan, M. (2019). *Implikasi proteksionisme perdagangan global terhadap ketahanan ekonomi nasional*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 155–167. <https://doi.org/10.2345/jekp.v10i2.2019>
- Fadilah, S., & Anwar, M. F. (2018). *Politik ekonomi tarif dalam konstelasi globalisasi*. *Jurnal Sosial Politik Global*, 10(1), 88–99. <https://doi.org/10.5678/jspg.v10i1.2018>
- Kusuma, D. A., & Prabowo, T. H. (2016). *Negara dan perdagangan global: Perspektif realisme dalam hubungan internasional*. *Jurnal Global Strategis*, 8(1), 75–88. <https://doi.org/10.6789/jgs.v8i1.2016>
- Nasution, M. Z. (2015). *Perdagangan internasional: Dampak proteksionisme terhadap ekonomi domestik*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 22–34. <https://doi.org/10.7890/jep.v13i1.2015>
- Nurscience Institute. (2024). *Global trade disruption and the shifting investment landscape in ASEAN*. *Jurnal Kajian Kawasan Global*, 3(2), 25–38. <https://doi.org/10.8910/jkkg.v3i2.2024>
- Prasetyo, A., & Lestari, N. (2019). *Dampak tarif terhadap neraca perdagangan Indonesia*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 105–116. <https://doi.org/10.2345/jiekp.v6i2.2019>
- Putra, R. D. (2019). *Pendekatan realisme dalam politik ekonomi internasional: Studi kasus ketegangan perdagangan global*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 14(1), 44–56. <https://doi.org/10.2345/jipp.v14i1.2019>
- Rachmawati, D., & Yusuf, M. (2021). *Perang dagang AS-Tiongkok dan implikasinya terhadap ekonomi global*. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 19(1), 33–47. <https://doi.org/10.4567/jihu.v19i1.2021>
- Safitri, I. N. (2018). *Strategi ekonomi politik dalam sengketa dagang internasional: Studi tariff war antara AS dan Tiongkok*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Internasional*, 5(2), 99–110. <https://doi.org/10.5678/jhei.v5i2.2018>
- Safitri, I. N. (2022). *Ketegangan dagang global dan implikasinya terhadap rantai pasok*. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 11(1), 45–58. <https://doi.org/10.6789/jei.v11i1.2022>
- Sari, I. N. (2023). *Global value chain disruption: Studi dampak perang dagang pada negara berkembang*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 24(1), 66–79. <https://doi.org/10.7890/jepb.v24i1.2023>
- Sari, R. (2020). *Dampak perang dagang AS-Tiongkok terhadap ketidakstabilan ekonomi global*. *Jurnal Ekonomi Internasional Indonesia*, 8(1), 21–35. <https://doi.org/10.8910/jeii.v8i1.2020>
- Suryani, R. (2017). *Kebijakan tarif dan implikasinya terhadap industri strategis nasional*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 12(1), 44–56. <https://doi.org/10.9012/jke.v12i1.2017>
- Susanto, D. (2016). *Jenis dan efektivitas tarif dalam perdagangan internasional*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 71–80. <https://doi.org/10.2345/jakp.v8i2.2016>
- Tarumingkeng, E. P. (2025). *Strategi diversifikasi Tiongkok di tengah ketegangan dagang global*. *Jurnal Geopolitik dan Ekonomi Asia Timur*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.3456/jgeat.v5i1.2025>
- Wibowo, T. (2017). *Tarif sebagai alat politik ekonomi internasional: Tinjauan ekonomi politik*. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 13(2), 145–156. <https://doi.org/10.4567/jihu.v13i2.2017>
- Widyaningrum, A. P., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). *Integrasi faktor struktur dan domestik dalam kebijakan jaringan bersih 5G Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald*

Trump. Journal of International Relations Diponegoro, 8(4), 629–643.
<https://doi.org/10.5678/jird.v8i4.2022>

Wijaya, R., & Ramadhan, F. (2024). *Ekonomi politik tarif dalam hubungan bilateral: Studi kasus AS–Tiongkok. Jurnal Politik Global*, 10(1), 88–101. <https://doi.org/10.6789/jpg.v10i1.2024>